

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada eksistensi *local gangster* Bali dalam dinamika demokrasi elektoral lokal pasca-otoritarian. *Local gangster* Bali – yang komposisinya adalah Laskar Bali dan Baladika – ternyata memiliki agenda tersendiri yang dibalut dengan nilai lokalitas khas Bali dalam praktek demokrasi elektoral lokal: kebangkitan bangsawan lokal (kaum puri) dalam kepemimpinan Bali. Dengan menggunakan kerangka Teori Populisme milik Ernesto Laclau, penelitian ini menemukan bahwa Laskar Bali dan Baladika yang berkoalisi menjadi *the 'people'* berhasil mengartikulasikan narasi kebangkitan bangsawan lokal dalam kepemimpinan di Bali kepada sistem demokrasi elektoral lokal. Adapun lahirnya wacana mengenai kebangkitan bangsawan lokal di era pasca-otoritarian ini merupakan respon masyarakat adat, termasuk kaum bangsawan, terhadap narasi nasionalisme serta tekanan rezim Orde Baru dengan narasi ideologi tunggal Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, kajian literatur, serta data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi kajian mengenai politik lokal di era pasca-otoritarian, terlebih dalam konteks kelompok milisi (*gangster*) dan dinamika praktek demokrasi elektoral lokal.

Kata Kunci: *Local Gangster*, Politik Lokal, Kebangkitan Bangsawan Lokal, Populisme

ABSTRACT

This study focuses on the existence of Balinese local gangsters in the dynamics of post-authoritarian local electoral democracy. Balinese local gangsters – whose composition is Laskar Bali and Baladika – have their own agenda wrapped in Balinese locality values in the context of local electoral democracy: the rise of local aristocrats (puri) in Bali's leadership. Using Ernesto Laclau's Populism Theory framework, Laskar Bali and Baladika coalesce as The 'People' and manage to articulate the narration of local aristocratic revival towards the local electoral democratic system. The birth of the rise of local aristocrats narration in the post-authoritarian era is a response of indigenous people, including the aristocrats, towards the nationalism narrative and the pressure of the New Order regime with its single ideological narrative (Pancasila). This study uses qualitative methods, where the data in this study through was obtained through in-depth interviews, literature review, and secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the General Election Commission (KPU). In the end, the results of this study can contribute to the study of Indonesia's local politics in the post-authoritarian era, especially in the context of militia groups (gangsters) and the dynamics of the local electoral democracy processes.

Keywords: Local Gangster, Local Politics, Local Aristocratic Revival, Populism

KATA PENGANTAR

Pada akhir 2016, penulis bersama rekan-rekan kuliah lainnya melakukan penelitian di Denpasar untuk mata kuliah Politik di Kota dengan kerangka penelitian mengenai dinamika masyarakat perkotaan. Saat itu pula, penulis menemukan banyak spanduk dengan logo organisasi masyarakat (ormas) – bagaimana masyarakat lebih awam menyebut *local gangster* dengan sebutan tersebut – dengan pesan yang bermacam-macam; mulai dari penolakan reklamasi Teluk Benoa hingga ucapan perayaan hari raya umat Hindu-Bali. Hingga pada kesempatan penulis melakukan wawancara ke berbagai pihak, seperti elite partai politik, pengurus desa *pakraman*, serta masyarakat, semua tidak pernah absen menyebutkan nama Laskar Bali dan Baladika yang diilustrasikan sebagai kelompok *vigilante*. Kedua nama kelompok ini jugalah yang banyak penulis lihat dalam spanduk yang bertebaran di jalanan Kota Denpasar. Hanya satu pertanyaan penulis saat itu: apa kepentingan kelompok-kelompok ini sehingga sebegitu ekspansifnya di tengah-tengah masyarakat?

Sepeninggal dari Bali, penulis banyak “berdiskusi” dengan beberapa penelitian terdahulu mengenai kelompok milisi, *vigilante*, dan *gangster* yang sebenarnya cukup sulit penulis temui. Bersyukur, buku *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective* yang ditulis oleh Vedi R. Hadiz menjadi pembuka gerbang utama untuk masuk lebih dalam ke pembahasan mengenai *gangster* yang berada dalam pusaran dunia politik. Dari sini, penulis memulai perjalanan riset yang lebih mendalam mengenai dua *gangster* kenamaan di Pulau Seribu Pura, yaitu Laskar Bali dan Baladika.

Dalam pengalaman demokrasi Indonesia sendiri, eksistensi *gangster* mulai marak di era Orde Baru. Pasca Petrus (Penembakan Misterius) dilancarkan, eksistensi *gangster* dilembagakan oleh negara demi mewujudkan sarana tertib sosial pada masa itu. Menariknya, lengsernya rezim Orde Baru tidak berdampak banyak bagi eksistensi *gangster* sendiri. Sebaliknya, berbarengan dengan asas

desentralisasi, eksistensi *gangster* menguat hingga ke tingkat lokal. Tak hanya sebagai sarana tertib sosial, kini eksistensi *gangster* juga diperhitungkan dalam ranah politik praktis.

Dengan hadirnya *gangster* dalam pusaran demokrasi elektoral lokal, kajian mengenai politik lokal di era pasca-otoritarian menjadi semakin beragam. Demokrasi elektoral di tingkat lokal juga dapat dilihat melalui perspektif kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai representasi masyarakat – seperti kelompok *gangster* ini. Sebelum lebih lanjut membaca penelitian ini, penulis berharap para pembaca membuang jauh pemahaman awam mengenai *gangster* yang kebanyakan hanya berkonotasi negatif. Melalui penelitian ini, kita semua akan memahami bahwa *gangster* lebih dari apa yang diilustrasikan oleh banyak orang pada umumnya. Selamat membaca!